

Membaca Implementasi Ekosistem Halal Di Kabupaten Bangkalan

Siti Awaliya Musyarofah

Universitas Trunojoyo Madura
190711100048@student.trunojoyo.ac.id

Khoirun Nasik

Universitas Trunojoyo Madura
khoirun.nasik@trunojoyo.ac.id

Abstrak

Bisnis halal adalah pola dunia saat ini. Kemungkinan bisnis halal akan terus berkembang per tahun. Seperti yang ditunjukkan oleh laporan dari State of The Global Islamic Report (2019), ada sekitar 1,8 miliar penduduk Muslim menjadi konsumen bisnis halal. Peluang konsumsi bisnis halal meningkat sebesar 5,2% setiap tahun dengan pengeluaran pembeli mencapai USD 2,2 triliun. Seiring pesatnya perkembangan bisnis halal, cenderung menjadi salah satu variabel dalam pengembangan lingkungan halal. Sebagai gambaran dari penataan yang dimulai oleh Wapres yang akan menjadikan Kabupaten Bangkalan sebagai Kawasan Industri Halal (KIH) dengan pemikiran bahwa Kabupaten Bangkalan memiliki daya tarik halalnya sendiri, salah satunya terkait dengan potensi besar industri travel halal. di Bangkalan yang terdiri dari objek wisata biasa, misalnya bukit Jaddih, pantai rongkang, sembilang. Sisi lain, sebagian besar penduduk Bangkalan beragama Islam. Ini menyiratkan bahwa sistem biologis halal adalah kebutuhan esensial. Islam sebagai agama tidak hanya supranatural, tetapi juga mengajarkan ekonomi dan sosiologi. Pemeriksaan itu meliputi MUI Kabupaten Bangkalan, DPRD Bangkalan, Kementerian Agama Bangkalan, Dinas Koperasi, Dinas Pariwisata. Penelitian ini diarahkan sepenuhnya untuk mengetahui posisi Kabupaten Bangkalan dengan tujuan akhir untuk kembali ke pembicaraan Wapres tentang pengembangan ekosistem halal dalam rangka percepatan Kabupaten Bangkalan menjadi Kawasan Industri Halal (KIH).

Kata Kunci : Implementasi, Ekosistem Halal, KIH

A. Pendahuluan

Bisnis halal adalah pola dunia saat ini. Kemungkinan bisnis halal akan terus berkembang per tahun. Sesuai laporan dari State of The Global Islamic Report (2019), ada sekitar 1,8 miliar penduduk Muslim menjadi pembeli bisnis halal tersebut. Pintu terbuka pembeli dalam bisnis halal meningkat 5,2% setiap tahun dengan pengeluaran pembelanja absolut mencapai USD 2,2 triliun. Dari jumlah tersebut seharusnya semakin berkembang secara konsisten. Proyeksi Compound Annual Growth Rate (CAGR) grafik bisnis halal meningkat 6,2% pada periode 2018 sampai 2024. Total aset yang dikeluarkan konsumen bisnis halal juga meningkat sampai USD 3,2 triliun setiap 2024. Dari informasi ini bisa terlihat bahwa bisnis halal mempunyai kemungkinan sangat cemerlang di masa depan (State of The Global Islamic

Report 2019). Indonesia mempunyai potensi yang luar biasa dalam perkembangan bisnis halal yang merupakan konsekuensi dari mayoritas jumlah umat Islam di Indonesia. Indonesia mewakili 12,7% populasi Muslim dunia. Pada tahun 2020 diprediksikan lebih dari 229 juta Muslim tinggal di Indonesia. Total populasi di Indonesia diperkirakan mencapai 273 juta orang, jadi total populasi Muslim setara 87,2% dari total populasi di Indonesia (Audit Populasi Total, 2020). Populasi muslim besar ini membuat minat pada produk halal juga besar. Indonesia seharusnya menjadi enkapsulasi pasar industri halal dunia. Sejujurnya, total pengeluaran yang dikeluarkan Indonesia untuk belanja barang halal adalah USD 218,8 miliar setiap tahun 2017 (Layanan Uang Republik Indonesia 2019).¹

Bank Indonesia (BI) memprediksi perkembangan moneter Indonesia berada pada kisaran 4,7% dan 5,5% pada tahun 2022, dari 3,2% menjadi 4,0% pada tahun 2021, sejalan dengan perbaikan ekonomi dunia, dan menambah produk unggulan eksekusi. solid, serta memperluas minat lokal karena penggunaan dan usaha yang maksimal. Didukung oleh inokulasi, pembukaan keuangan dan kebangkitan politik. “Energi kerja sama politik yang solid dan eksekusi keuangan pada tahun 2021 merupakan cash-flow untuk meningkatkan pemulihan moneter Indonesia akan lebih baik pada tahun 2022.

Ekonomi syariah dan industri halal merupakan sektor yang berkontribusi dalam penciptaan nilai ekonomi dengan memberikan peluang dan peluang serta memenuhi permintaan pasar.² Berbagai dukungan yang diberikan oleh pemerintah melalui berbagai program termasuk kebijakan untuk mendukung pengembangan ekonomi syariah pada tahun 2022. Salah satu upayanya adalah memperkuat ekosistem rantai nilai halal.³ Perubahan gaya hidup halal di masyarakat tercermin dari perubahan permintaan barang halal, yang berdampak pada ketersediaan produk halal. Halal lifestyle membutuhkan perlindungan halal dari rantai produksi hingga konsumsi. Strategi pengembangan industri halal Indonesia semakin diperkuat, dimulai dengan regulasi dan diakhiri dengan pengembangan kawasan industri halal.

Kawasan Industri Halal merupakan tempat di mana semua industri berlaku sesuai dengan standar Islam. Proses produksi yang mengarah ke distribusi produk ke konsumen. Ekosistem halal meliputi produksi barang atau jasa, pemerintah, SDM dan Infrastruktur.

¹ Muhammad Anwar Fathoni, “Potret Industri Halal Indonesia: Peluang dan Tantangan,” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 6, no. 3 (October 23, 2020): 428.

² Julistia, et al. (2021). Analisis Ekosistem Halal Value Chain Pada UMKM Di Kota Medan. *Jurnal Ilmu Sosisal dan KeIslaman*, Vol 6 (2): 247-255.

³ Kholifatul Husna Asri and Amin Ilyas, “Penguatan Ekosistem Halal Value Chain sebagai Pengembangan Industri Halal Menuju Era 5.0” (n.d.): 11.

Ekosistem industri halal mencakup beberapa aspek yang harus diperhatikan, antara lain⁴, (1) aspek finansial, (2) proses produksi dan (3) regulasi.

Penciptaan industri halal membutuhkan ekosistem halal, yang tidak hanya terwujud dalam bahan baku dan produksi, tetapi juga mencakup pembiayaan di bawah otoritas pengatur, oleh karena itu, keuangan syariah berperan penting dalam pembentukan ekosistem halal. Salah satu rantai dari terciptanya ekosistem halal adalah dari sektor pariwisata. Yang meliputi adanya sektor kuliner, penginapan, layanan jasa dan sirkulasi keuangan yang akan saling berkaitan secara sistematis.

Potensi wisata halal di Bangkalan cukup besar dari wisata alam seperti bukit Jaddih, pantai rongkang, Sembilangan. Menurut data Kementerian Pariwisata, bisnis syariah, merupakan sektor pariwisata di Indonesia, mengalami kenaikan jumlah pengunjung yang tinggi, tentunya berdampak pada percepatan ekosistem halal jika dikembangkan dengan baik.

Di sisi lain, mayoritas penduduk Bangkalan beragama Islam. Artinya, ekosistem halal merupakan kebutuhan dasar. Islam sebagai agama tidak hanya transcendental, tetapi juga mengajarkan ekonomi dan sosiologi. Salah satu bidang Islam yang berkembang pesat dalam satu dekade terakhir adalah bidang ekosistem untuk mewujudkan misi besar Islam yaitu Rohmatan Lil Alamin. Demikian yang menjadi alasan peneliti untuk mengkaji bagaimana implementasi ekosistem halal di Kabupaten Bangkalan.

B. Mengenal Ekosistem Halal

Ekosistem adalah satu kesatuan yang menyeluruh antar unsur lingkungan dan saling mempengaruhi. Ekosistem adalah sebuah hubungan yang kompleks antara makhluk hidup dan lingkungannya.⁵ Ekosistem halal adalah sistem dalam jaringan kompleks perusahaan, lembaga, lembaga pemerintah, dan LSM. Ekosistem halal setidaknya memiliki lima sektor: barang, jasa, infrastruktur, sumber daya manusia, dan dukungan pemerintah.

Ekosistem yang terjadi antar manusia menunjukkan interaksi sosial berupa hubungan individu dengan individu, individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok, dan setiap kegiatan dalam hubungan itu saling memiliki keterkaitan. Hasil interaksi yang berlangsung menimbulkan perubahan sosial, misalnya cara hidup baru yang

⁴ Ibid.

⁵ Arna Asna Annisa, "Kopontren dan Ekosistem Halal Value Chain," Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam 5, no. 01 (April 4, 2019): 1.

tercipta baik dari individu maupun kelompok. Selain itu, cara hidup ini menentukan sikap untuk memenuhi kebutuhan individu dan kolektif.⁶

Istilah halal identik dengan bahan pangan contohnya makanan dan minuman. Secara khusus, hal ini sudah sering dibahas oleh para ulama. Sebagaimana tertuang pada Alquran Q.S al-Baqarah ayat 168 dan Q.S. al-Maidah ayat 3. Selanjutnya istilah halal meliputi kategori gaya hidup. Arti halal secara luas meliputi seluruh hal tentang kehidupan dan gaya hidup. Pada dasarnya, halal merujuk pada kegiatan syariah. Dengan makna lain, konsep halal bisa menjadi arahan kepada umat muslim dalam menentukan produk maupun layanan yang memenuhi hukum dan norma Islam.

Orang yang cerdas halal' adalah satu tingkat keatas menuju cara hidup optimal dan ramah. Kondisi kehidupan dan budaya sering kali menentukan gaya hidup yang dianutnya. Gaya hidup halal adalah praktik kehidupan dalam mengkonsumsi dan menggunakan barang/jasa tidak bertentangan dengan nilai dan prinsip Islam. Hukum Islam sering menjadi penentu utama bagi umat Islam untuk mencari nafkah demi kelangsungan hidupnya.⁷

Bisa ditarik kesimpulan bahwa konsisten halal merupakan sistem yang terhubung antara kegiatan produksi halal satu dengan yang lain sehingga menciptakan lingkungan halal. Ekosistem halal juga dapat digambarkan sebagai tatanan yang saling memiliki keterkaitan antar semua elemen dalam mendukung produksi halal, atau sebagai rantai kegiatan produksi halal yang saling berkaitan dalam lingkungan yang saling mempengaruhi. Ekosistem merupakan mata rantai yang saling terhubung dan menciptakan nilai (value chain) dengan menghubungkan satu rantai dengan rantai yang lain.

Rantai nilai halal (Halal Value Chain) adalah sebuah konsep tentang ekosistem bisnis yang tidak hanya didasarkan pada sektor perdagangan tetapi juga memiliki akses ke pariwisata dan keuangan halal.⁸ Perkembangan dan perubahan gaya hidup masyarakat yang semakin kompleks memerlukan respon yang tepat, dengan penyesuaian rantai pasok sebagai kunci utama. Dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 173 tentang kehalalan produk yang artinya "Bahan yang diharamkan Allah adalah bangkai, darah, babi dan

⁶ Ibid.

⁷ Hendri Hermawan Adinugraha, Mila Sartika, and Ahmad Hasan Asy'ari Ulama'i, "Halal Lifestyle di Indonesia" 05, no. 2 (2019): 25.

⁸ Asri and Ilyas, "Penguatan Ekosistem Halal Value Chain sebagai Pengembangan Industri Halal Menuju Era 5.0."

hewan yang disembelih dengan nama selain Allah”.

C. Ekosistem Halal Di Indonesia

Indonesia telah membedakan 10 bidang yang secara fundamental berkontribusi pada bisnis halal, baik secara finansial maupun ekonomi. Secara khusus, makanan, pariwisata dan perjalanan, pakaian dan desain, produk perawatan kecantikan, keuangan, obat-obatan, media dan rekreasi, kesehatan, sekolah, dan bisnis sosial.⁹ Kemudian, metodologi utama yang digunakan sebagai semacam perspektif mitra untuk memperkuat ekosistem halal adalah memperkuat rantai nilai halal, memperkuat keuangan Islam, memperkuat usaha kecil dan menengah (UMKM), memperkuat ekonomi digital, memperkuat pedoman dan penguatan. Pemerintah, menciptakan batasan penelitian, memperluas kualitas dan jumlah SDM, serta memperluas perhatian dan pendidikan publik.

Ekosistem industri halal bertujuan untuk menjadi alat logistik daya saing lingkungan yang menentukan keberhasilan industri halal. Ekosistem yang layak harus memiliki opsi untuk mengubah manfaat relatif menjadi keunggulan. Manfaat serupa adalah manfaat yang bergantung sepenuhnya pada kepemilikan aset (seperti segmen keuntungan Muslim atau kelimpahan aset normal) namun membutuhkan peningkatan atau penghargaan tambahan. Sementara itu, keunggulan adalah manfaat yang dapat meningkatkan nilai kreasi dan prevalensi SDM dalam kaitannya dengan kemajuan dan inovasi.

Ekosistem halal mencakup semua perspektif, namun ada dua sudut utama yang menjadi fokus, khususnya¹⁰ : yaitu: (i) ekosistem di lingkungan pembiayaan atau pendanaan; (ii) ekosistem di lingkungan proses produksi; dan (iii) ekosistem di lingkungan regulasi. Membuat industri halal memerlukan ekosistem halal, dan pedoman halal dihitung dari komposisi alami maupun penciptaan, dan mencakup aspek keuangan, otoritas regulasi, sehingga keuangan syariah merupakan komponen kunci dari ekosistem industri halal. Legalitas halal diperlukan dari proses manufaktur yang diidentifikasi oleh sertifikasi. Sertifikasi halal merupakan praktik industri yang merupakan. Sertifikat halal merupakan praktik modern yang merupakan komponen untuk menjamin mutu dan penataan yang dapat dimanfaatkan sebagai tanda sifat barang modern. Industri menunjukkan konsistensi

⁹ Kementerian Agama, “Ekosistem Halal: Menjanjikan Tapi Menantang,” accessed June 21, 2022, <https://kemenag.go.id/read/ekosistem-halal-menjanjikan-tapi-menantang-q90jp>.

¹⁰ Lokot Zein Nasution, “Penguatan Industri Halal bagi Daya Saing Wilayah: Tantangan dan Agenda Kebijakan” 1, no. 2 (2020): 25.

dengan norma, menunjukkan bahwa barang yang dijamin halal sesuai dengan prinsip syariah. Selain itu, hal ini juga menggarisbawahi struktur administrasi perusahaan yang solid, tanggung jawab, keterusterangan, dan ketaatan pada standar syariah¹¹. Sistem ini bisa dipakai dalam menentukan kualitas barang serta menangani masalah terkait kerentanan dalam sifat barang dan administrasi modern.

D. Hambatan dan Percepatan Penerapan Ekosistem Halal Di Indonesia

Salah satu kendala dalam mewujudkan ekosistem halal di Indonesia adalah belum adanya kecakapan Halal. Sudut lain untuk memperkuat ekosistem halal adalah pendidikan halal untuk memperluas jumlah dan sifat pembuat dan pembeli halal. Gagasan instruksi halal adalah jenis pemahaman masyarakat, pengontrol, pendukung keuangan dan pelaku industri yang mengkonsumsi, mengawasi dan membedah. Konsep pendidikan halal bergantung pada konsep kemahiran yang terkait dengan kemampuan untuk membaca, menulis, memahami, dan selanjutnya mengembangkan kemampuan yang terkait dengan bisnis halal. Konsep kemahiran bisnis halal mencakup siklus serta upaya untuk memperoleh informasi serta pemahaman tentang bisnis halal. Siklus kemahiran dapat berkembang sesuai dengan peningkatan bisnis halal, sehingga memperluas pengaruh pemanfaatan masyarakat terhadap barang-barang modern halal.

Berbagai penelitian telah menyatakan tentang pertukaran dan penguatan ekosistem halal sangat didominasi oleh kepercayaan menghitung jaringan inventaris, akibatnya berdampak pada daya beli pembeli. Perspektif kepercayaan sebenarnya bukan bagian dari keaslian kemajuan bisnis halal di Indonesia, karena keaslian halal berasal dari tanda deklarasi halal. Sampai saat ini, penguatan kehalalan yang menyeluruh dan ketat masih diperlukan dan dipraktekkan di tempat berkumpulnya setiap industri halal dari para pelakunya. Penegasan kualitas halal juga mencakup sudut pandang keuangan dan pedoman untuk mengirimkan barang halal di Indonesia saja belum menyebabkan lembaga keuangan syariah digunakan dalam penilaian konfirmasi. Penunjuk uang adalah salah satu penanda kehalalan suatu barang. Karena keuangan sangat mungkin merupakan sumber (hulu/kontribusi) paling awal untuk pengembangan barang halal. Cara untuk mempercepat pengembangan ekosistem

11 Ibid.

syariah di Indonesia yaitu meningkatkan ekosistem halal (Halal Value Chain) dengan menetapkan pedoman.

Kami menginginkan rencana strategi untuk membatasi kesulitan dan memperkuat lingkungan bisnis halal dengan tujuan yang dapat merangkul kemampuan pasar dunia. Tak kurang dari tiga usulan terlihat dengan asumsi laju perkembangan bisnis halal bisa diperluas. (I) Dari segi nilai tambah finansial, kemajuan Bisnis Halal seharusnya meningkatkan kecepatan peningkatan nilai yang signifikan. Penciptaan keuangan lingkungan. (ii) Dari sisi bantuan pemerintah, peningkatan bisnis halal seharusnya mempercepat pengentasan kemiskinan dan tingkat pengangguran. (iii) Dari segi nilai, kemajuan bisnis halal seharusnya mempercepat penyebaran keuntungan sosial dan mengurangi ketidakseimbangan.¹²

E. Implementasi Ekosistem Halal Di Kabupaten Bangkalan Ditinjau Dari 5 Aspek Mendasar

Aspek Infrastruktur merupakan salah satu aspek terbentuknya ekosistem halal. Dalam hal ini Kabupaten Bangkalan sudah pada tahap pengembangan terbukti dengan tersedianya tempat ibadah di wisata religi Makam Syaikhona Kholil Bangkalan sebagai wujud dari infrastruktur dalam konteks ekosistem halal. Menurut Kabid Destinasi Disbudpar Dinas Pariwisata, Kabupaten Bangkalan sudah bisa dikategorikan sebagai daerah dengan mengaju pada pengembangan ekosistem halal yang dalam hal ini sudah memiliki kesiapan dari segi pariwisata halal yaitu dengan adanya wisata religi halal Makam Syaikhona Kholil dan Makam Aer Mata Ebu, yang menjadi acuan bahwa pada wisata religi ini termasuk dalam ekosistem halal menurut pendekatan maqasid syariah.

Aspek selanjutnya yaitu aspek produksi barang. Pada aspek ini lebih menekankan dalam proses sertifikasi halal terhadap produksi produk barang. Terkait sertifikasi halal ini, dasar filosofis lembaga hukum ada 2 yaitu : a) yang mendominasi agama adalah al-Qur'an dan al-Hadits; b) kemudian terkait dominan hukum positif didasarkan pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan terakhir Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk

¹² Ibid.

Halal.¹³ Dalam proses sertifikasi halal pada produksi produk barang ini kementerian agama Kabupaten Bangkalan berperan penting dalam pelaksanaannya, kementerian agama juga sudah melakukan koordinasi terkait dengan sertifikasi halal ini dengan beberapa dinas terkait seperti dinas perdagangan, dinas koperasi, dinas perindustrian, dinas peternakan dan dinas pertanian mengenai sosialisasi menyeluruh tentang sertifikasi halal.

Aspek jasa mempunyai peranan penting dalam proses terbentuknya ekosistem halal di daerah tertentu. Yang mana dalam hal produksi produk jasa tepatnya di Kabupaten Bangkalan masih belum terlaksana untuk proses sertifikasi halal atau mendapat izin halal secara legal. Akan tetapi sesuai dengan pandangan ketua MUI Cabang Bangkalan bahwa proses sertifikasi halal akan menyeluruh sampai ke produksi produk jasa. Terkait dengan pengembangan ekosistem halal di Kabupaten Bangkalan guna percepatan tahapan Kabupaten Bangkalan menjadi Kawasan Industri Halal upaya koordinasi dengan pihak yang berkaitan terus dihimbau untuk dilaksanakan kedepannya.

Aspek sumber daya manusia memegang peranan penting dalam keberhasilan seluruh aspek yang lain. Pentingnya sosialisasi terkait dengan konsep halal dalam upaya pengembangan SDM yang mana output dari program sosialisasi ini bisa menghasilkan SDM yang bisa menguasai dan memahami konsep halal berkaitan dengan terbentuknya ekosistem halal di Kabupaten Bangkalan. Koordinasi dalam rencana program sosialisasi menyeluruh ini masih dalam tahap pengonsepan untuk bisa dieksekusi oleh pihak terkait.

Aspek pemangku kebijakan Terkait dengan upaya pengembangan ekosistem halal untuk Undang-Undang atau Peraturan Daerah tentang ekosistem halal masih dalam proses pembentukan. Dalam rencana pembentukan Undang-Undang ini akan ada klasifikasi tertentu sesuai dengan bagian dan tujuan pembentukannya. Menurut Abu Sholeh selaku Kabid DPRD Bangkalan sebelum Undang-Undang atau Perda itu dibuat upaya awal yang dilakukan adalah mengadakan sosialisasi terkait dengan ekosistem halal kepada masyarakat menyeluruh yang dikoordinasikan oleh Dispenda dan Kementerian Agama. Terkait dengan kendala yang dihadapi dalam Raperda ini adalah kurangnya respon dari masyarakat terkait dengan upaya sosialisasi yang diadakan oleh PEMDA pada waktu-waktu sebelumnya. Faktor lain yang berkaitan dengan upaya pengembangan ekosistem halal guna menjadikan Kabupaten Bangkalan menjadi Kawasan Industri Halal (KIH) yaitu

¹³ Panji Adam Agus, "KEDUDUKAN SERTIFIKASI HALAL DALAM SISTEM HUKUM NASIONAL SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM HUKUM ISLAM," *Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah* 1, no. 1 (January 31, 2017): 150-165.

tentang anggaran dana melalui upaya pengembangan infrastruktur maupun regulasi pelaksanaan belum tersedia dikarenakan Undang-Undang atau Perda yang masih dalam tahap pembentukan.

Beberapa hambatan dalam penerapan ekosistem halal di Kabupaten Bangkalan yaitu terkait dengan kurangnya SDM yang cakap dan mumpuni, dan dalam hal ini infrastruktur yang mengacu pada percepatan pengembangan ekosistem halal di Kabupaten Bangkalan belum tersedia secara maksimal. Kemudian terkait dengan ketidaksiapan pemangku kebijakan dalam penetapan peraturan atau undang-undang terkait dengan ekosistem halal yang menjadi tolak ukur upaya dalam meminimalisir tantangan dan memperkuat ekosistem halal. Dalam hal percepatan penerapan ekosistem halal di Kabupaten Bangkalan sudah masuk dalam kategori siap dilihat dari aspek kesiapan dalam upaya sertifikasi halal pada produk barang lokal, aspek ini juga sangat berpengaruh dalam keberhasilan pengembangan ekosistem halal di suatu daerah. Dalam hal sertifikasi ini kedepannya akan mengarah juga ke sertifikasi produk jasa lokal di Kabupaten Bangkalan sebagai upaya lanjutan dalam percepatan pengembangan ekosistem halal di Kabupaten Bangkalan.

F. Kesimpulan

Bisa ditarik kesimpulan bahwa kesiapan Kabupaten Bangkalan dalam upaya pengembangan ekosistem halal untuk menjadi Kawasan Industri Halal (KIH) masih sekitar 25% dari kesiapan keseluruhan. Faktor yang menjadi hambatan dalam hal ini terkait dengan kurangnya SDM yang cakap dan mumpuni, dan terkait dengan infrastruktur yang mengacu pada percepatan pengembangan ekosistem halal di Kabupaten Bangkalan belum tersedia secara maksimal. Kemudian terkait dengan ketidaksiapan pemangku kebijakan dalam penetapan peraturan atau undang-undang terkait dengan ekosistem halal yang menjadi tolak ukur upaya dalam meminimalisir tantangan dan memperkuat ekosistem halal. Untuk upaya percepatan pengembangan ekosistem halal di Kabupaten Bangkalan dilihat dari aspek kesiapan dalam upaya sertifikasi halal pada produk barang lokal, aspek ini juga sangat berpengaruh dalam keberhasilan pengembangan ekosistem halal di suatu daerah. Dalam hal sertifikasi ini ke depannya akan mengarah juga ke sertifikasi produk jasa lokal di Kabupaten Bangkalan sebagai upaya lanjutan dalam percepatan pengembangan ekosistem halal di Kabupaten Bangkalan.

Daftar Pustaka

- Arna Asna Annisa, “Kopontren dan Ekosistem Halal Value Chain,” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 5, no. 01 (April 4, 2019): 1.
- Asri and Ilyas, “Penguatan Ekosistem Halal Value Chain sebagai Pengembangan Industri Halal Menuju Era 5.0.”
- Hendri Hermawan Adinugraha, Mila Sartika, and Ahmad Hasan Asy’ari Ulama’i, “HALAL LIFESTYLE DI INDONESIA” 05, no. 2 (2019): 25.
- Julistia, et al. (2021). Analisis Ekosistem Halal Value Chain Pada UMKM Di Kota Medan. *Jurnal Ilmu-ilmu Sosisal dan KeIslaman*, Vol 6 (2)
- Kementrian Agama, “Ekosistem Halal: Menjanjikan Tapi Menantang,” accessed June 21, 2022, <https://kemenag.go.id/read/ekosistem-halalmenjanjikan-tapi-menantang-q90jp>.
- Kholifatul Husna Asri and Amin Ilyas, “Penguatan Ekosistem Halal Value Chain sebagai Pengembangan Industri Halal Menuju Era 5.0” (n.d.): 11.
- Lokot Zein Nasution, “Penguatan Industri Halal bagi Daya Saing Wilayah: Tantangan dan Agenda Kebijakan” 1, no. 2 (2020)
- Muhammad Anwar Fathoni, “Potret Industri Halal Indonesia: Peluang dan Tantangan,” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 6, no. 3 (October 23, 2020)
- Panji Adam Agus, “Kedudukan Sertifikasi Halal Dalam Sistem Hukum Nasional Sebagai Upaya Perlindungan Konsumen Dalam Hukum Islam,” *Ammwaluna: Jurnal Ekonomi dan Kenangan Syariah* 1, no. 1 (January 31, 2017)